

**PERAN AKUNTAN DALAM MENEGAKKAN PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA
PERUSAHAAN DI INDONESIA
(TINJAUAN PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN)**



**Disampaikan Pada Sidang Senat Guru Besar Universitas
Diponegoro
Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar**

Oleh:

Arifin, Drs. M.Com. (Hons.), Akt. Ph.D.

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2005

Bismillahirrohmanirrohiim.

Yang saya hormati :

Bapak Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro

Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Diponegoro

Dewan Guru Besar Universitas Diponegoro

Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Diponegoro

Bapak Gubernur dan Muspida Propinsi Jawa Tengah atau yang mewakili

Para Guru Besar dari Luar Lingkungan Universitas Diponegoro

Para Pembantu Rektor Universitas Diponegoro

Para Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Diponegoro

Para Ketua dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Diponegoro

Para Dosen di Lingkungan Universitas Diponegoro

Para Mahasiswa Universitas Diponegoro

Para tamu undangan, teman sejawat, kawan seprofesi, dan seluruh keluarga yang berbahagia,

Assalamualaikum warohmatullahi wa barakaatu,

Selamat pagi dan salam sejahtera

Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita karunia nikmat dan limpahan rahmat yang tiada terhingga sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti Sidang Senat Terbuka Universitas Diponegoro. Syukur yang mendalam juga kami rasakan atas Rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah diberikan kepada saya sekeluarga sehingga saya dapat mencapai jabatan akademik sebagai Guru Besar di Universitas Diponegoro.

Terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Rektor/Ketua senat Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan dan kehormatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan pidato saya yang berjudul

PERAN AKUNTAN DALAM MENEGAKKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (TINJAUAN PERSPEKTIF *AGENCY THEORY*).

Isu hangat yang menarik perhatian para ekonom dan pelaku bisnis di Indonesia saat ini adalah tentang *Good Corporate Governance* (GCG). Sejak adanya krisis finansial di berbagai negara di tahun 1997-1998 yang diawali krisis di Thailand (1997), Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial Asia ini dipandang sebagai akibat lemahnya praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di negara-negara Asia. Ini disebabkan adanya kondisi-kondisi obyektif yang relatif sama di negara-negara tersebut antara lain adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku bisnis, konglomerasi dan monopoli, proteksi, dan intervensi pasar sehingga membuat negara-negara tersebut tidak siap memasuki era globalisasi dan pasar bebas (Tjager dkk., 2003).

Adanya kegagalan beberapa perusahaan dan timbulnya kasus malapraktik keuangan akibat krisis tersebut adalah buruknya praktik *Corporate Governance* (CG). Menurut Pangestu dan Hariyanto (dalam Suprayitno dkk., 2004), karakteristik lemahnya praktik CG di Asia Tenggara adalah (1) adanya konsentrasi kepemilikan dan kekuatan *insider shareholders* (termasuk pemerintah dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pusat kekuatan), (2) lemahnya *governance* sektor keuangan, dan (3) ketidakefektifan *internal rules* dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas untuk berhadapan dengan pemegang saham mayoritas dan manajer.

GCG akhirnya menjadi isu penting, terutama di Indonesia yang merasakan paling parah akibat krisis tersebut dan masih berlanjut sampai saat ini. Disamping itu, banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan emiten di pasar modal yang ditangani Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) menunjukkan rendahnya mutu praktik GCG di negara kita. Misalnya pada tahun 2001 adanya dugaan *insider trading* atas saham PT Bank Central Asia. *Insider trading* adalah salah satu perilaku buruk yang dilakukan orang dalam PT. BCA pada proses transaksi saham. Ini terlihat dalam bentuk gejolak di dalam transaksi dan pergerakan harga saham bank tersebut menjelang rencana divestasi. Diduga hal ini berhubungan dengan

adanya pihak manajemen yang mengetahui serta memanfaatkan momentum penjualan saham kepada investor strategis untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi informasi. Praktik perdagangan dengan menggunakan hak akses informasi oleh orang dalam (*inside information*) ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap salah satu prinsip GCG, yaitu kewajaran (*fairness*).

Contoh lainnya adalah terungkapnya kasus *mark-up* laporan keuangan PT. Kimia Farma yang *overstated*, yaitu adanya pengelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (karena laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132 miliar). Kasus ini melibatkan sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi auditor perusahaan tersebut ke pengadilan, meskipun KAP tersebut yang berinisiatif memberikan laporan adanya *overstated* (Tjager dkk., 2003). Dalam kasus ini terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengungkapan yang akurat (*accurate disclosure*) dan transparansi (*transparency*) yang akibatnya sangat merugikan para investor, karena laba yang *overstated* ini telah dijadikan dasar transaksi oleh para investor untuk berbisnis.

Skandal keuangan juga terjadi di negara maju, seperti di Amerika Serikat (AS) dengan adanya kasus Enron. Sejak tahun 2000, Enron adalah sebuah perusahaan yang *established* dengan pertumbuhan finansial yang pesat sehingga Enron menjadi salah satu dari 10 perusahaan terbesar di AS. Skandal mulai terungkap ketika awal tahun 2002, perhitungan atas *total revenue* Enron di tahun 2000 yang dinyatakan berjumlah 100,8 miliar US dolar (USD), dihitung kembali oleh *Petroleum Finance Company* (PFC) menjadi hanya 9 miliar USD. Ketika kebangkrutan mulai terjadi, harga saham Enron dengan cepat turun dari sekitar 80 USD menjadi kurang dari satu dolar. Skandal finansial "megadolar" yang disebabkan adanya *misleading financial statement* membawa dampak yang luar biasa antara lain: Enron pailit, kurangnya kepercayaan atas informasi keuangan, rusaknya citra profesi akuntan di Amerika, dan hilangnya ratusan juta dolar uang yang diinvestasikan di Enron serta hilangnya pekerjaan atas ribuan karyawan Enron.

Hadirin yang saya muliakan,

Isu CG sesungguhnya sudah lama dikenal di negara-negara Eropa dan Amerika dengan adanya konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini akan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (sebagai prinsipal)

dengan pihak manajemen sebagai agen (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya pemisahan pemilik dan manajemen ini, dalam literatur akuntansi disebut dengan *Agency Theory* (teori keagenan). Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/manajer. Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*Conflict of Interest*). Pertentangan dan tarik menarik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan permasalahan yang dalam *Agency Theory* dikenal sebagai *Asymmetric Information (AI)* yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat AI yang tinggi, menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kerja yang dilaporkan untuk kepentingan diri sendiri.

Dengan adanya hal tersebut, dalam praktik pelaporan keuangan sering menimbulkan ketidak transparanan yang dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Akibat adanya perilaku manajemen yang tidak transparan dalam penyajian informasi ini akan menjadi penghalang adanya praktik *GCG* pada perusahaan-perusahaan karena salah satu prinsip dasar dari *GCG* adalah *Transparency* (keterbukaan).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam rangka menegakkan prinsip *GCG* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyajian informasi akuntansi yang berkualitas dan lengkap dalam laporan tahunan sangat diperlukan. Hal ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Untuk itulah dalam uraian berikut ini akan dibahas tentang *Agency Theory* sebagai awal timbulnya isu tentang *Good Corporate Governance (GCG)*, kemudian *Good Corporate Governance* beserta prinsip-prinsip yang melandasinya, dan peran akuntan dalam menegakkan prinsip *GCG* di Indonesia. Konsepsi *CG* dalam bahasan ini didasarkan sudut pandang organisasi perusahaan privat sebagai *open system*. Burrell dan Morgan (1979) menyatakan bahwa suatu organisasi mempunyai fungsi yang sama dengan organisme yang berhadapan dengan lingkungannya. Untuk dapat bertahan hidup, organisasi tersebut harus

menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana organisasi tersebut berada (misal budaya masyarakat, pemerintah, aturan dan regulasi lainnya).

*Para hadirin yang saya hormati, berikut ini bahasan tentang **TEORI KEAGENAN (AGENCY THEORY)**.*

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa isu *GCG* diawali dengan munculnya pemisahan antara pemilik dan manajemen. Pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal, sedangkan manajemen sebagai agen. *Agency Theory* mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya.

Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return* maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat *fairness* yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalance khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti dari *Agency Theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997).

Menurut Eisenhard (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang keorganisasian, dan (c) asumsi tentang informasi.

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dan agen. Sedangkan asumsi tentang informasi adalah

bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Baik prinsipal maupun agen, keduanya mempunyai *bargaining position*. Prinsipal sebagai pemilik modal mempunyai hak akses pada informasi internal perusahaan, sedangkan agen yang menjalankan operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, namun agen tidak mempunyai wewenang mutlak dalam pengambilan keputusan, apalagi keputusan yang bersifat strategis, jangka panjang, dan global. Hal ini disebabkan untuk keputusan-keputusan tersebut tetap menjadi wewenang dari prinsipal selaku pemilik perusahaan.

Adanya posisi, fungsi, kepentingan, dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang namun saling membutuhkan ini, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu sama lain. Apabila agen (yang berperan sebagai penyedia informasi bagi prinsipal dalam pengambilan keputusan) melakukan upaya sistematis yang dapat menghambat prinsipal dalam pengambilan keputusan strategis melalui penyediaan informasi yang tidak transparan, sedang di lain pihak prinsipal selaku pemilik modal bertindak semaunya ataupun sewenang-wenang karena ia merasa sebagai pihak yang paling berkuasa dan penentu keputusan dengan wewenang yang tak terbatas, maka kemudian yang terjadi adalah pertentangan yang semakin tajam yang akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang ekonomik (*homo economicus*) yang berperilaku ingin memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Dalam konsep *Agency Theory*, manajemen sebagai agen semestinya *on behalf of the best interest of the shareholders*, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah disebut dengan *Agency Problem* yang salah satunya disebabkan oleh adanya *Asymmetric Information*.

Asymmetric Information (AI), yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara

prinsipal dan agen. Dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya disajikan oleh agen. Akibatnya informasi yang diperoleh prinsipal kurang lengkap sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang telah dipercayakan kepada agen.

Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri) ini, dapat menimbulkan 2 (dua) permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah :

- (a). *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
- (b) *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Adanya *agency problem* di atas, menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*), yang menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari :

- (a) *The monitoring expenditures by the principle*. Biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen melalui *budget restriction, dan compensation policies*
- (b) *The bonding expenditures by the agent*. The bonding cost dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan.
- (c) *The residual loss* yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya *agency relationship*.

Dari pembahasan di atas, bila dibuatkan ringkasan tentang asumsi dan penerapan *agency theory* dalam organisasi akan tampak dalam tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Asumsi Dasar dalam *Agency Theory*

Asumsi Manusia	: <i>Homo Economicus</i> , yang memaksimalkan utilitasnya
Model Perilaku	: <i>Self serving behavior</i>
Fakta Penerapannya	: Prinsipal dan agen cenderung menerapkan tujuan secara kaku (<i>rigid</i>)
Akibat yang timbul	: <i>Conflict of Interest</i>
Konsekuensi	: Timbul <i>agency cost</i> dalam mengawasi kinerja manajer/agen
Pemecahan	: <i>Sharing rule</i> antara prinsipal dan agen perlu dibuat
Reward	: Ekstrinsik, yaitu komoditi berwujud dan bisa dipertukarkan dan memiliki nilai pasar yang bisa diukur
Asumsi Informasi	: Sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan

Hadirin yang saya hormati,

Aplikasi Agency Theory pada Pengelolaan Perusahaan.

Konsep pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) para pemegang saham dan pengelolaan (*management*) para agen atau manajer dalam perusahaan telah menjadi kajian sejak tahun 1930-an. Manajemen perusahaan publik yang besar biasanya bukan pemilik. Bahkan sebagian besar manajemen puncak (*top management*) hanya memiliki saham nominal dalam perusahaan yang mereka kelola.

Bila dilihat dari perkembangan teori perusahaan dan hubungannya dengan kebutuhan *GCG*, dari perspektif *Agency Theory*, tabel 2 berikut ini menunjukkan perkembangan akan kebutuhan *GCG* pada teori korporasi klasik, modern, dan post-modern.

Tabel 2. Perkembangan Teori Korporasi dan Implikasinya Terhadap *Good Corporate Governance*

TEORI KORPORASI KLASIK	TEORI KORPORASI MODERN	TEORI KORPORASI POST-MODERN
<p><u>KARAKTERISTIK :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan de-ngan <i>single-majo-rity shareholders</i>. 2. Prinsipal me-rangkap sebagai Agen. 3. Keseimbangan kepentingan antara prinsipal dan agen tidak penting. 	<p><u>KARAKTERISTIK :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan de-ngan banyak peme-gang saham, namun masih ada kepe-milikan mayoritas. 2. Fungsi Prinsipal dan Agen mulai terpisah. 3. Meskipun pemi-lik mayoritas masih memiliki otoritas yang besar, kepen-tingan pemegang saham minoritas sudah diperhatikan 	<p><u>KARAKTERISTIK :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan dengan banyak pemegang sa-ham, dan tidak ada ke-pemilikan mayoritas. 2. Sulit untuk meng-identifikasi ‘the true principal’. 3. Prinsipal umumnya tidak atau kurang memahami bisnis. 4. Agen memiliki pe-ngaruh yang besar dalam menjalankan perusahaan. 5. Terjadi ketidakse-imbangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>)
<p><u>IMPLIKASI :</u> Aspek <i>Good Cor-porate Governance</i> TIDAK diperlukan.</p>	<p><u>IMPLIKASI :</u> Aspek <i>Good Cor-porate Governance</i> MULAI diperlukan</p>	<p><u>IMPLIKASI :</u> Aspek <i>Good Corpo-rate Governance</i> SANGAT diperlukan</p>

Dalam uraian tentang *Agency Theory* di atas disebutkan bahwa adanya perilaku dari manajer/agen untuk bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain/pemilik, dapat terjadi karena manajer mempunyai informasi yang lengkap mengenai perusahaan, sedangkan informasi tersebut tidak dimiliki oleh pemilik perusahaan (dalam hal ini timbul *Asymmetric Information* atau *AI*).

Adanya *AI* dan *self serving behavior* pada manajer/agen, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang kurang bermanfaat bagi perusahaan. Adanya kondisi ini menimbulkan tata kelola perusahaan yang kurang sehat karena tidak adanya keterbukaan dari manajemen untuk mengungkapkan hasil kinerjanya kepada prinsipal sebagai pemilik perusahaan. *Agency Theory* menganalisis dan mencari solusi atas dua permasalahan yang muncul dalam hubungan antara para *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* mereka (manajemen). Berdasarkan kondisi semacam ini, dibutuhkan sistem tata kelola yang baik pada perusahaan yang disebut dengan *Good Corporate Governance* (*GCG*) yang akan dibahas pada uraian berikut ini.

Para hadirin yang saya muliakan, berikut ini bahasan tentang Good Corporate Governance.

Istilah *Corporate Governance* (*CG*) pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report* (Tjager dkk., 2003). Terdapat banyak definisi tentang *CG* yang pendefinisianya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori pemegang saham (*shareholding theory*), dan (b) teori stakeholder (*stakeholding theory*).

Shareholding theory mengatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. *Shareholding theory* ini sering disebut sebagai teori korporasi klasik yang sudah diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Definisi *CG* yang berdasar pada *shareholding theory* diberikan oleh Monks dan Minow (1995) yaitu hubungan berbagai partisipan (pemilik/investor dan manajemen) dalam menentukan arah dan kinerja korporasi. Definisi lain diajukan oleh Shleifer dan Vishny (1997) yang menyebutkan bahwa *CG* sebagai cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh hasil

(*return*) yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan.

Stakeholding theory, diperkenalkan oleh Freeman (1984), menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Definisi stakeholder ini termasuk karyawan, pelanggan, kreditur, supplier, dan masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi. Adapun definisi *Good Corporate Governance* dari *Cadbury Committee* yang berdasar pada teori stakeholder adalah sebagai berikut :

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities”.

(Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka).

Beberapa institusi Indonesia mengajukan definisi CG, antara lain oleh FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) tahun 2000 yang mendefinisikan CG sama seperti *Cadbury Committee*, sedangkan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* atau IICG (2000) mendefinisikan CG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain.

Pengertian lain CG menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), *Good Corporate Governance* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

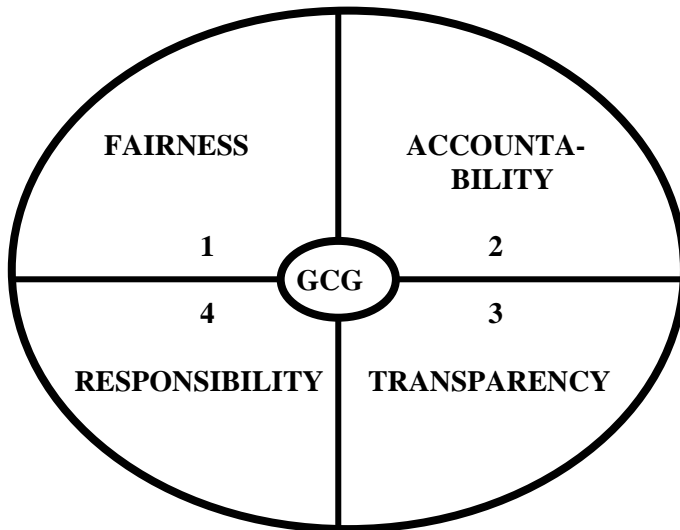
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, nampak dengan jelas bahwa CG merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

PRINSIP DASAR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Tujuan *GCG* pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Dalam praktiknya *CG* berbeda di setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menimbulkan beberapa versi yang menyangkut prinsip-prinsip *CG*, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan.

Menurut Cadbury Report (1992), prinsip utama *GCG* adalah: keterbukaan, integritas dan akuntabilitas. Sedangkan menurut *Organization for Economic Corporation and Development* atau OECD, prinsip dasar *GCG* adalah: kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh *GCG* telah diterapkan dalam perusahaan. Dalam pidato saya ini, selanjutnya akan digunakan prinsip dasar menurut OECD.

Gambar 1 di bawah ini menunjukkan empat prinsip dasar *Good Corporate Governance*.



Gambar 1. Empat Prinsip *Good Corporate Governance*

Penjelasan ke empat prinsip dasar di atas adalah sebagai berikut:

1. Kewajaran (*fairness*). Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik *insider trading* yang dilakukan oleh agen/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*).

2. Akuntabilitas (*accountability*). Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *Agency Problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.

3. Transparansi (*transparency*). Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sarna. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi; termasuk juga

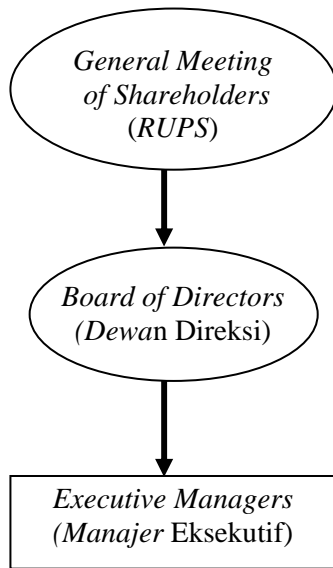
mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka (Tjager dkk, 2003 : 51). Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian (*disclosure*) informasi yang dimiliki perusahaan.

4. *Responsibilitas (responsibility)*. *Responsibilitas* diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. *Responsibilitas* menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya.

Hadirin yang saya hormati, berikut ini adalah bahasan mengenai
STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE

Struktur didefinisikan sebagai satu cara bagaimana aktivitas dalam organisasi dibagi, diorganisir, dan dikoordinasi (Stoner, Freeman, dan Gilbert, 1995). Struktur *governance*, dapat diartikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip *governance* sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan serta dikendalikan. Secara spesifik, struktur *governance* harus didesain untuk mendukung jalannya aktivitas organisasi secara bertanggungjawab dan terkendali.

Pada dasarnya struktur *governance* diatur oleh Undang-undang sebagai dasar legalitas berdirinya sebuah entitas. Misalnya dalam model Anglo-Saxon, struktur *governance* akan terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), *Board of Directors* (representasi dari para pemegang saham/pemilik), serta *Executive managers* (manajemen yang akan menjalankan aktivitas). Model Anglo-Saxon ini disebut dengan *Single-board system* yaitu struktur *CG* yang tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam sistem ini anggota dewan komisaris juga merangkap anggota dewan direksi dan kedua dewan ini disebut sebagai *board of directors*. Perusahaan-perusahaan di Inggris dan Amerika serta negara-negara lain umumnya berbasis *single-board system* yang dipengaruhi langsung oleh model Anglo-Saxon. Bagan 1 di bawah ini adalah skema yang menunjukkan struktur *single-board system*.

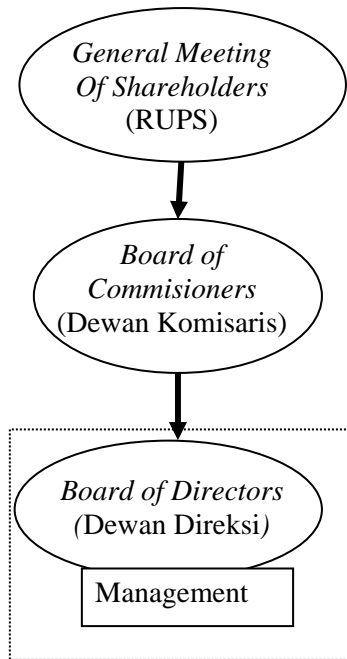


Bagan 1. Struktur *Corporate Governance Single-Board System* (Anglo-Saxon Model)

Sumber : Tjager dkk (2003) dan Syakhroza (2005).

Sedangkan untuk model Continental Europe, struktur *governance* terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direktur, dan Manajer Eksekutif (manajemen). Struktur semacam ini disebut *Two-board system*, yaitu struktur CG yang dengan tegas memisahkan keanggotaan dewan, yakni antara keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan.

Bagan 2 di bawah ini adalah skema yang menunjukkan struktur *Corporate Governance* model Continental Europe (*Dual –Board System*).



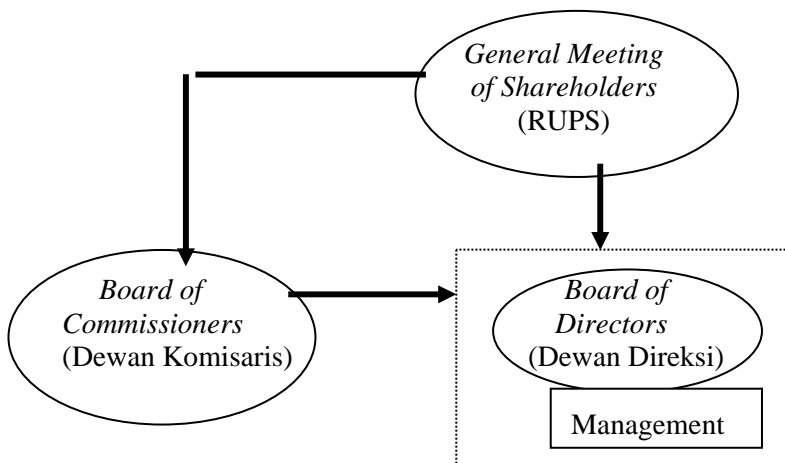
Bagan 2. Struktur *Governance Model Dual-Board System* (Continental Europe Model)

Sumber : Tjager dkk (2003) dan Syakhroza (2005).

Dalam model *two-board system*, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan struktur tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris yang mewakili para pemegang saham untuk melakukan kontrol terhadap manajemen. Dewan komisaris membawahi langsung dewan direksi dan mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan dewan direksi serta melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan direksi dalam menjalankan perusahaan. Posisi dewan komisaris dalam model ini relatif kuat terhadap direksi sehingga fungsi pengendalian/kontrol terhadap kegiatan manajemen dapat berjalan dengan efektif. .

Perusahaan-perusahaan di Indonesia pada uinumnya berbasis *two-*

board system atau *two-tier board system* seperti kebanyakan perusahaan di Eropa (model Continental Europe). Hanya ada perbedaan dalam kedudukan dewan komisaris yang tidak langsung membawahi dewan direksi. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 yang menyatakan bahwa anggota dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 80 ayat 1 dan pasal 91 ayat 1), demikian juga anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 95 ayat 1 dan pasal 101 ayat 1). Dengan adanya struktur yang demikian, maka baik dewan komisaris maupun dewan direksi bertanggungjawab terhadap RUPS (kedudukannya sejajar). Bagan 3 di bawah ini menunjukkan struktur *CG* di Indonesia.



Bagan 3. Struktur *Corporate Governance* di Indonesia
(*Dual-Board System*)

Sumber : Tjager dkk (2003) dan Syakhroza (2005).

Dengan melihat posisi yang sejajar antara dewan komisaris dan dewan direksi (manajemen) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, mengakibatkan kedudukan dewan komisaris di Indonesia tidak sekuat seperti dewan komisaris di Continental Europe karena dewan komisaris tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan dewan direksi. Dewan direksi tidak harus bertanggungjawab terhadap dewan komisaris. Bila ditinjau dari

perspektif *good governance*, kedudukan yang sejajar ini dapat mengakibatkan pelaksanaan fungsi pengendalian (*control*) berjalan kurang efektif karena bisa saja dewan komisaris dianggap oleh dewan direksi sebagai partner kerja, bukan sebagai pengawas kerja dewan direksi. Hal ini bisa menjadi salah satu hambatan untuk melaksanakan *GCG* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Saran yang dapat diberikan adalah perlu ditinjau kembali Undang-undang Perseroan Terbatas, khususnya tentang pengaturan kembali adanya kedudukan yang sejajar antara dewan komisaris dan dewan direksi.

Hadirin yang saya muliakan,

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Walsh dan Seward, 1990).

Walsh dan Seward (1990) menyatakan bahwa terdapat 2 mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan *GCG*, yaitu: (1) mekanisme pengendalian internal perusahaan, dan (2) mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar.

Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return* maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Salah satu pilihan mekanisme pengendalian internal untuk menyamakan kepentingan pemegang saham dan manajer adalah kontrak insentif jangka panjang (Walsh dan Seward, 1990; Jensen, 1993). Kontrak jangka panjang ini dilakukan dengan memberikan insentif pada manajer apabila nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham meningkat, salah satunya dengan cara memberi kepemilikan saham kepada manajer (Jensen dan Meckling, 1976; Fama, 1980). Dengan demikian, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan kemakmuran pemegang saham karena hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan manajer sendiri.

Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan (*market for corporate control*), pada saat diketahui bahwa manajemen berperilaku menguntungkan diri sendiri, kinerja perusahaan akan menurun yang direfleksikan oleh nilai saham perusahaan. Pada kondisi tersebut, kelompok manajer lain akan menggantikan manajer yang sedang memegang jabatan. Dengan demikian bekerjanya *market for corporate control* bisa menghambat tindakan menguntungkan diri manajer sendiri (Jensen dan Meckling, 1976).

Mekanisme pengendalian lain yang secara luas digunakan dan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah mekanisme melalui pelaporan keuangan. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab manajer, pemilik dapat mengukur, menilai, sekaligus dapat mengawasi kinerja manajer untuk mengetahui sejauh mana manajer telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik. Selain itu pemilik dapat memberikan kompensasi kepada manajer berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat dengan berdasarkan angka-angka akuntansi diharapkan berperan besar dalam meminimalkan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimmerman, 1986).

Dalam hubungannya dengan jenis informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, terdapat dua jenis sifat informasi yang diungkapkan. Penmann (1988) membagi sifat informasi yang diungkapkan menjadi *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*. Informasi yang bersifat *mandatory disclosure* merupakan informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan karena memang diwajibkan oleh peraturan atau undang-undang. Sedangkan *voluntary disclosure* merupakan jenis informasi yang secara sukarela diungkapkan di dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk menambah kegunaan informasi mengenai kekayaan dan hasil operasi suatu perusahaan kepada para pemakai laporan keuangannya. Informasi yang bersifat *voluntary disclosure* ini berperan untuk melengkapi informasi yang bersifat *mandatory disclosure* yang diharapkan dapat meningkatkan kegunaan informasi dalam laporan keuangan.

Dari hasil penelitian terdahulu diperoleh hasil bahwa praktik *disclosure* ternyata sangat beragam antar negara. Chow dan Wong-Boren (1987) serta Meek dan Robert (1995) menyatakan bahwa di Meksiko informasi mengenai laba unit bisnis (*profit by lines of business*) adalah wajib diungkapkan (*mandatory*), tetapi di Swedia dan Perancis, informasi ini

bersifat *voluntary*. Sebaliknya, di Swedia dan Perancis informasi tentang tanggungjawab sosial (*social responsibility*) perusahaan wajib diungkapkan, tetapi di Meksiko informasi tersebut masih bersifat sukarela. Perbedaan ini disebabkan peraturan tentang *disclosure* yang berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Selain hal tersebut, keragaman informasi yang disajikan juga disebabkan oleh perbedaan karakteristik pasar, khususnya pasar modal antara negara maju dan negara yang masih berkembang. Penelitian Saudagaran dan Diga (1997) tentang karakteristik dan isu-isu kebijakan pelaporan keuangan antar berbagai pasar modal di negara maju dan berkembang menemukan hasil bahwa perbedaan tersebut didasari atas tiga kriteria yaitu (1) *availability of information* (ketersediaan informasi), (2) *reliability* (keandalan), dan (3) *comparability* (daya banding).

Dalam hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi *disclosure* dalam laporan keuangan, berbagai penelitian telah dilakukan, diantaranya oleh Firth (1989), Cooke (1992), dan Arifin (2001). Firth (1989) meneliti praktik *voluntary disclosure* perusahaan publik di Inggris. Dia menyatakan bahwa perusahaan yang tergolong perusahaan berskala kecil di Inggris memiliki kecenderungan untuk lebih meningkatkan *voluntary disclosure* dalam laporan keuangannya dengan tujuan agar dapat memperoleh sumber dana di pasar modal. Cooke (1992) meneliti laporan tahunan perusahaan publik di Jepang. Dia menemukan bahwa *voluntary disclosure* sangat dipengaruhi oleh besar (*size*) perusahaan. Perusahaan yang berskala besar secara signifikan mengungkapkan lebih banyak informasi daripada perusahaan yang berskala kecil. Di Indonesia, Arifin (2001) menemukan bahwa perusahaan yang berbasis asing (*multinational firms*) ternyata memiliki *level of voluntary disclosure* yang lebih tinggi daripada perusahaan domestik. Selain itu, Arifin (2001) juga menemukan bahwa dari 60 item informasi yang bersifat *voluntary disclosure* dari persepsi pemakai (*users*), 24 item memiliki derajat kepentingan yang tinggi, sedangkan dari persepsi penyaji atau manajemen (*preparers*) hanya sejumlah 12 item.

Dari uraian di atas, baik mekanisme internal maupun eksternal keduanya mempunyai tujuan untuk menyelaraskan hubungan antara prinsipial dan agen dengan meminimalkan konflik yang terjadi yang disebabkan oleh Asymmetry Information.

Hadirin yang saya muliakan,

Bagaimana penerapan prinsip GCG pada perusahaan di Indonesia?.

Dalam mewujudkan *GCG* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terdapat dua aspek keseimbangan, yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal dilakukan dengan cara menyajikan informasi yang berguna dalam evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan, semua transaksi dan kejadian internal, dan informasi untuk keputusan manajemen internal. Sedangkan keseimbangan eksternal dilakukan dengan cara menyajikan informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditur, bank, dan organisasi lainnya yang berkepentingan.

Untuk mewujudkan dua aspek keseimbangan tersebut, terdapat empat prinsip dasar praktik *GCG* yang telah dibahas di depan. Keempat prinsip dasar ini harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan perusahaan. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan menyediakan informasi secara terbuka dan lengkap tentang aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan tahunannya.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1994 telah menyatakan bahwa informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan harus mengikuti prinsip *full disclosure*. Demikian pula pihak BAPEPAM sebagai *regulatory body* pasar modal di Indonesia sudah menentukan bahwa semua perusahaan yang telah go-public di Indonesia harus menjalankan prinsip *full disclosure* dalam laporan keuangannya dan ini merupakan bagian dari upaya penegakan *GCG*.

Pertanyaan yang timbul adalah apakah segala informasi tentang kejadian di perusahaan itu harus diungkapkan (di-disclose) dalam laporan keuangan?

Untuk menjawabnya, dapat mengacu kepada Hendriksen dan Breda (1992) yang berpendapat bahwa *disclosure* dalam laporan keuangan mengandung arti untuk menyajikan informasi yang berguna membantu beroperasinya pasar modal secara efisien. Dalam kaitannya dengan prinsip pengungkapan, Belkaoui (1981) dan Hendriksen dan Breda (1992) menyatakan bahwa *disclosure* mempunyai tiga prinsip yaitu '*adequate, fair, dan full*'.

Pengungkapan yang cukup (*adequate*) adalah yang paling umum digunakan, tetapi ini mengandung suatu pengertian adanya keterbatasan dalam penyajian informasi karena menurut prinsip *adequate disclosure* ini, informasi bisa disajikan seminimum mungkin asal cukup sehingga laporan keuangan masih tidak menyesatkan. Kemudian, pengungkapan yang *fair* (wajar) mengandung suatu tujuan etis yaitu memberikan informasi yang lengkap untuk kepentingan umum dan bukan untuk pihak tertentu.

Sedangkan prinsip yang *full* (lengkap) adalah menyajikan semua informasi yang berguna dan relevan kepada pemakai laporan keuangan. Dalam pemakaian prinsip disclosure ini, ternyata BAPEPAM lebih senang untuk menggunakan prinsip *full disclosure*. Peran akuntan manajemen dalam penyajian informasi perusahaan kepada pemakainya menjadi sangat penting karena ketidaktransparanan akan mengakibatkan berkurangnya manfaat informasi.

Beberapa peneliti telah melakukan studi untuk menguji *disclosure quality* atas informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan emiten. Beaver (1989) memberikan bukti tentang kegunaan informasi yang di-*disclose* (diungkapkan) dalam laporan keuangan yang mengandung unsur *predictive value*. Ia melakukan studi mengenai manfaat rasio-rasio keuangan untuk memprediksi *failure* (kegagalan usaha menuju kebangkrutan). Hasilnya menyatakan bahwa dengan menggunakan analisis rasio keuangan, kegagalan usaha dapat diprediksi sebelumnya.

Di Australia, Arifin (1992) melakukan studi untuk menganalisis praktik *full disclosure* dalam laporan keuangan perusahaan yang telah *go-public*. Data dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner kepada para pemakai laporan keuangan, yaitu sejumlah investor institusional (*institutional investors*) di Australia. Hasil penelitiannya menemukan bahwa prinsip *full disclosure* cenderung menghasilkan informasi yang relevan dan reliabel, tetapi tidak menghasilkan informasi yang komparabel. Hal ini disebabkan terdapat berbagai ragam tanggal tutup buku perusahaan di Australia sehingga untuk melakukan perbandingan (komparabilitas) antar laporan keuangan mengalami kesulitan. Dengan menggunakan metodologi yang sama, di Indonesia, Arifin (1998) melakukan penelitian tentang prinsip *full disclosure* dalam laporan keuangan perusahaan publik dengan kualitas informasi akuntansi (relevan, reliabel, dan komparabel). Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip *full disclosure* dapat mendukung reliabilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan, namun tidak mendukung relevansi dan komparabilitas informasi akuntansi.

Untuk menjamin terlaksananya mekanisme *governance*, sebenarnya dalam undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995 telah diatur beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Khusus mengenai prinsip transparansi keuangan, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa direksi perusahaan diharuskan menerbitkan laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan interim (tengah tahunan) dan laporan keuangan

tahunan (*annual report*) yang harus diaudit oleh akuntan publik dan dipublikasikan dalam surat kabar nasional.

Lebih lanjut, pihak BAPEPAM melalui aturannya nomor 38 tahun 1996 lebih memperjelas aturan tersebut dengan mengeluarkan aturan tentang hal-hal apa saja yang harus dirinci oleh perusahaan publik dalam menerbitkan laporan tahunan mereka (Herwidayatmo, 2000). Laporan tahunan harus mencakup ikhtisar data keuangan penting perusahaan untuk periode lima tahun, analisis dan pembahasan oleh manajemen, penjelasan mengenai investasi atau divestasi, transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan transaksi dengan pihak afiliasi serta laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Upaya untuk menegakkan prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan yang telah go-public oleh BAPEPAM terus berlangsung. Tujuannya adalah (a) menjaga kelangsungan usaha perusahaan dengan pengelolaan yang lebih baik, struktur organisasi yang jelas, dan sistem informasi manajemen yang akurat, (b) mengurangi adanya *Asymmetry Information* antara manajemen dan pemilik perusahaan, dan (c) menjaga kepercayaan publik dengan pengungkapan informasi yang berkualitas dalam laporan tahunannya.

Meskipun upaya penerapan *GCG* terus berlangsung, namun praktik *GCG* di perusahaan di Indonesia masih ada kelemahan-kelemahan. Menurut Herwidayatmo (2000), praktik-praktik di Indonesia yang bertentangan dengan konsep *GCG* dapat dikelompokkan menjadi (a) adanya konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan, (b) tidak efektifnya dewan komisaris, dan (c) lemahnya *law enforcement*.

Karakteristik lemahnya *CG* yang melekat di perusahaan-perusahaan Indonesia dan terjadinya berbagai skandal menyebabkan rendahnya penilaian penerapan *CG* di Indonesia. Menurut Erry Riyana (2000, dalam Suprayitno dkk., 2004), hasil penelitian Booz Allen yang mengevaluasi kualitas *CG* di negara-negara ASEAN, menempatkan Indonesia di peringkat yang paling bawah. Ini memang cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya peran aktif dari berbagai pihak yang terlibat di dalam perbaikan kinerja perusahaan. Memang sudah banyak aturan dan kebijakan-kebijakan yang ada untuk berupaya menegakkan prinsip *GCG*, namun dalam praktiknya masih belum optimal sehingga masih perlu diatur lagi atau direvisi aturan yang sudah ada, termasuk beberapa pasal dalam Undang-

Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 seperti yang telah di bahas sebelumnya.

*Para hadirin yang saya hormati, sampailah kita pada pokok bahasan tentang **PERAN AKUNTAN DALAM MENEGAKKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

Accounting is a language of business. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Sebagai suatu bahasa, akuntansi harus mengandung suatu informasi (yang dalam hal ini adalah informasi bisnis) yang mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat dari penyampai (manajemen) kepada penerima (*stakeholders*). Informasi ini disampaikan melalui komunikasi verbal dalam bentuk laporan. Pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan merupakan cara dari pihak perusahaan (sebagai *sender*) untuk memberikan informasi atas hasil operasinya selama satu periode tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan (sebagai *receiver*) untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai suatu bahasa bisnis, informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan harus dapat berguna dan tidak membingungkan para pemakainya. Dalam konteks *Agency Theory*, laporan keuangan disajikan oleh manajer/agen sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan pemilik/prinsipal yang diamanahkan kepadanya. Dengan demikian, penyaji laporan keuangan adalah agen dan pemakai laporan keuangan adalah prinsipal.

Akuntan adalah salah satu profesi yang terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Keterlibatan akuntan mencakup dua pihak, yaitu internal dan eksternal. Keterlibatan internal terjadi bila akuntan menjadi salah satu bagian dari manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Selaku akuntan manajemen, akuntan adalah bagian dari manajemen perusahaan sehingga dia terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas perusahaan. Menurut perspektif teori keagenan, dalam hal ini akuntan adalah bagian dari agen sehingga perilaku akuntan boleh dikatakan sama dengan perilaku agen.

Keterlibatan eksternal akuntan adalah bila akuntan menjalankan profesinya sebagai auditor yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan. Profesi auditor dari para akuntan memainkan peran yang penting (*crucial*) karena mereka memverifikasi kewajaran informasi yang mendasari dilakukannya berbagai macam transaksi bisnis

pemakai laporan keuangan. Tanpa kepercayaan terhadap kebenaran kondisi keuangan suatu perusahaan, para investor akan ragu untuk membeli saham suatu perusahaan terbuka dan pasar akan sulit tercipta (Tjager dkk, 2003).

Dalam hubungannya dengan prinsip *GCG*, peran akuntan secara signifikan terlibat dalam berbagai aktivitas penerapan masing-masing prinsip *GCG* sebagai berikut :

1. Prinsip Kewajaran (*fairness*). Laporan keuangan dikatakan wajar bila laporan keuangan tersebut memperoleh opini atau pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dari akuntan publik. Laporan keuangan yang wajar berarti laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material, disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Keuangan). Peran akuntan independen (akuntan publik) adalah memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan. Adanya kewajaran laporan keuangan dapat mempengaruhi investor untuk membeli atau menarik sahamnya pada sebuah perusahaan. Jelaslah bahwa kegunaan informasi akuntansi dalam laporan keuangan akan dipengaruhi oleh adanya kewajaran penyajian. Kewajaran penyajian dapat dipenuhi jika data yang ada didukung oleh adanya bukti-bukti yang syah dan benar serta penyajiannya tidak ditujukan hanya untuk sekelompok orang-orang tertentu.

Bagi akuntan manajemen, meskipun dia bekerja untuk pihak manajemen, mereka tetap harus memegang profesionalisme mereka karena akuntan sebagai profesi dalam melaksanakan tugasnya dibatasi oleh kode etik dan mereka harus tetap menjaga *public trust* dari masyarakat. Memang sering terjadi konflik dalam diri akuntan yang bekerja pada perusahaan karena di satu pihak mereka harus tetap memegang kode etik profesi namun di lain pihak kadangkala mereka harus menuruti keinginan manajemen perusahaan tempat mereka bekerja untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kode etik. Bila terjadi hal yang demikian, keputusan untuk berdiri pada pihak yang mana ada pada diri akuntan. Bila akuntan tersebut memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya, tentu dia tetap memegang etika profesi untuk mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara *fair* sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku. Dengan ditegakkannya prinsip *fairness* ini, paling tidak akuntan berperan membantu pihak *stakeholders* dalam menilai perkembangan suatu perusahaan dan membantu mereka untuk

membandingkan kondisi perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Untuk itu, laporan keuangan yg disajikan harus memiliki daya banding (*comparability*). Daya banding dapat diperoleh jika informasi akuntansi disajikan secara konsisten, baik konsisten dalam pemakaian metode akuntansi maupun konsisten dalam pengukurannya. Jika penggunaan metode dan prinsip penyajian setiap tahunnya berbeda, akan sulit kiranya para pemakai untuk melakukan perbandingan atau melakukan penilaian terhadap perkembangan usaha perusahaan.

2. Prinsip Akuntabilitas (*accountability*) adalah merupakan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif yaitu dengan dibentuknya komite audit. BAPEPAM mensyaratkan bahwa anggota komite audit minimum sebanyak 3 orang dan salah satu anggotanya harus akuntan. Komite audit mempunyai tugas utama untuk melindungi kepentingan pemegang saham ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan melakukan tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi dalam laporan keuangan dan laporan operasional lain beserta kriteria untuk mengukur, melakukan klasifikasi dan penyajian dari laporan tersebut. Untuk alasan itulah profesi akuntan sangat diperlukan dan mempunyai peranan yang penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Dengan adanya independensi dari komite audit tersebut akan mempengaruhi investor dalam melakukan pilihannya untuk membeli atau melepas suatu saham yang bisa dilihat dari adanya *abnormal return* (Steven J. Carlson, et al, 1998).

3. Prinsip Transparansi (*transparency*). Prinsip transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas penyajian informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu akuntan manajemen (yang bekerja pada perusahaan) dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sarna. Untuk itu informasi yang ada dalam perusahaan harus diukur, dicatat, dan dilaporkan oleh akuntan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian yang lengkap (*disclosure*) atas semua informasi yang dimiliki perusahaan. Peran akuntan manajemen, internal auditor, dan komite audit menjadi penting terutama dalam hal penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara

transparan kepada pemakainya. Ini sesuai dengan salah satu aturan BAPEPAM yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan publik harus mengandung unsur keterbukaan (transparansi) dengan mengungkapkan kejadian ekonomis yang bermanfaat kepada pemakainya. Praktik yang dikembangkan dalam rangka transparansi diantaranya perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang berkait dengan perusahaan, risiko yang dihadapi dan rencana/kebijakan perusahaan (*corporate action*) yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk menyampaikan kepada semua pihak tentang struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi.

4. Prinsip Responsibilitas (*responsibility*). Prinsip ini berhubungan dengan tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat yaitu dengan cara mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya. Prinsip ini berkaitan juga dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Seiring dengan perubahan sosial masyarakat yang menuntut adanya tanggungjawab sosial perusahaan, profesi akuntan juga mengalami perubahan peran. Pandangan pemegang saham dan stakeholder lainnya saat ini tidak hanya memfokuskan pada perolehan laba perusahaan tetapi juga memperhatikan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selain itu kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham tetapi juga oleh *stakeholder* yang lain (misalnya masyarakat dan pemerintah). Kasus PT. Inti Indorayon di Sumatera Utara yang ditutup karena dianggap bermasalah dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya adalah contoh suatu perusahaan yang melalaikan tanggungjawab sosialnya dengan tidak mencantumkan aktivitas pengelolaan lingkungan sosial dalam laporan tahunannya. Pelaporan informasi non-keuangan ini secara umum telah terakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Dalam PSAK nomor 1 ini dinyatakan bahwa perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting. Untuk itulah sudah saatnya akuntan manajemen mengungkapkan informasi tentang aktivitas perusahaan yang menyangkut aspek SEE (*Social, Ethical, dan Environment*). Peran akuntan untuk menegakkan prinsip ini semakin berkembang dengan adanya *Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)* yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Bapepam, BEJ, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dan *Forum for Corporate*

Governance in Indonesia pada bulan Juni 2005. Tujuan ISRA ini adalah memberikan *award* kepada perusahaan yang telah menerapkan dan membuat *Sustainability Reporting (SR)* dengan baik guna mendorong perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. SR adalah pengungkapan (*disclosure*) tentang kegiatan perusahaan yang menyangkut aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang merupakan tanggungjawab sosial perusahaan (Satyo, 2005). Dalam proses penyiapan ISRA ini, peran akuntan manajemen sangat besar. Akuntan yang menjadi *top management*, dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong penyajian *Sustainability Reporting*, sedangkan akuntan yang berada pada *middle management* dapat berperan dalam penilaian dan pengukuran aktivitas SEE perusahaan serta dampak yang dipengaruhinya.

Para hadirin yang saya muliakan,

HARAPAN PROFESI AKUNTAN MENDATANG

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa profesi akuntan merupakan elemen utama dari *GCG*, sehingga penegakan *GCG* tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan profesi akuntan. Peran utama ini sayangnya banyak diragukan oleh berbagai pihak dengan adanya kegagalan audit (*audit failures*) yang mengakibatkan terjadinya banyak skandal keuangan akhir-akhir ini. Memang tidak mudah untuk menjaga independensi akuntan pemeriksa (auditor) dalam melaksanakan tugasnya. Adanya kasus-kasus finansial yang melibatkan profesi akuntan merupakan bukti bahwa sikap independensi yang harus dimiliki oleh akuntan sulit untuk dipertahankan. Hal ini disebabkan para auditor atau akuntan ini memiliki tanggung jawab yang *ambigius*. Di satu sisi mereka harus bersikap dan bekerja untuk perusahaan yang membayar mereka, di sisi lain mereka harus memperhatikan kepentingan para investor yang bergantung sepenuhnya kepada kebenaran laporan audit mereka.

Namun perlu diketahui bahwa, dari perspektif teori keagenan, skandal keuangan yang terjadi tidak hanya menggambarkan ‘kegagalan’ dari auditor eksternal dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak yang bekerja untuk kepentingan prinsipal (pemegang saham), tetapi juga mengindikasikan tidak berfungsinya akuntan manajemen atau auditor internal yang bekerja untuk kepentingan agen (Soegiharto, 2005). Hal ini dikarenakan salah satu fungsi utama auditor internal adalah menjamin berjalannya prosedur sebagaimana yang seharusnya (*compliance*) dan mencegah terjadinya

transaksi keuangan dan kecurangan lain yang menyimpang. Ternyata auditor internal tidak mampu mendeteksi adanya kecurangan dan manipulasi keuangan secara dini.

Harapan ke depan untuk akuntan publik sebagai auditor eksternal adalah tetap menjaga sikap independensi secara konsisten dan meningkatkan profesionalisme. Sikap independensi ini perlu dijaga untuk menghindari keterlibatan akuntan dari kasus keuangan. Adanya SK Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik pasal 6 ayat 4 yang mengatur bahwa satu Kantor Akuntan Publik maksimum 5 tahun berturut-turut boleh memeriksa klien yang sama, menunjukkan tendensi agar akuntan diharapkan masih bisa menjaga independensinya sebab semakin lama akuntan dan klien berhubungan, secara emosional mereka akan semakin akrab. Hubungan yang semula antara *auditor* dan *auditee*, bisa menjadi hubungan konsultasi yang tidak menutup kemungkinan akhirnya bisa menjadi hubungan atasan dan bawahan.

Untuk meningkatkan profesionalisme sebagai akuntan eksternal, mereka harus mampu untuk mempersempit *expectation gap* yang muncul pada pemakai laporan keuangan atas profesi yang mereka lakukan. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan *training* (baik formal maupun informal) dan disiplin dalam penegakan profesi, serta meningkatkan *communication skill* mereka dan ini sesuai dengan salah satu fungsi akuntansi sebagai *the language of business*.

Sedangkan untuk akuntan manajemen dan auditor internal, di masa mendatang agar perannya dalam menegakkan prinsip GCG lebih efektif, fungsinya harus dapat diperluas tidak hanya sekedar menjaga ketaatan terhadap kebijakan (*compliance*) tetapi juga bisa berfungsi sebagai *Early Warning System* sehingga kecurangan dan ketidakbenaran penggunaan sumber dana perusahaan segera dapat diketahui dan diatasi selagi dini.

*Hadirin yang saya hormati, Sampailah kita pada **SIMPULAN***

Berdasarkan bahasan-bahasan di atas, dapat dikatakan bahwa persoalan yang muncul dalam perusahaan sehingga tidak dapat berkembang dengan baik adalah adanya tata kelola (*governance*) yang buruk. Kegagalan operasi perusahaan-perusahaan di Indonesia sejak terjadinya krisis ekonomi diindikasikan oleh para pakar dan peneliti karena adanya praktik *corporate governance* yang jelek.

Buruknya tata kelola perusahaan adalah akibat adanya perilaku yang tidak diharapkan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan

perusahaan. Untuk menghilangkan akibat tersebut, harus diketahui tentang sebab. Untuk itulah mengetahui sebab yang mengakibatkan terjadinya *agency conflict* perlu dilakukan, sebelum aturan demi aturan dibuat oleh pihak regulator.

Untuk menegakkan empat prinsip *GCG*, terlebih dahulu harus dianalisis kemudian dihilangkan persoalan yang timbul dari adanya pemisahan pemilik dan manajemen seperti yang telah diuraikan dalam bahasan *agency theory*. Diharapkan dengan adanya empat prinsip *GCG*, yang pada intinya diharapkan mampu untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen (sebagai pemilik dan manajemen perusahaan), dapat tercipta tata kelola perusahaan yang baik (*GCG*) perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa penyajian informasi yang lengkap dan berkualitas dalam laporan keuangan (sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas) akan mampu mengurangi *asymmetric information* dan membuat berbagai pihak merasa senang dan ini sebagai awal terciptanya *GCG*. Penerapan prinsip-prinsip *GCG* yang didukung dengan regulasi yang memadai, akan mencegah berbagai bentuk *overstated* dan ketidakjujuran manajemen dalam *financial disclosure* yang merugikan para *stakeholders*. Regulasi untuk profesi-profesi yang menunjang terbentuknya *CG* juga perlu dibuat agar jasa yang diberikan oleh masing-masing profesi masih berkualitas. Memang sudah banyak aturan dan kebijakan-kebijakan yang ada untuk berupaya menegakkan prinsip *GCG*. Bila dilihat dari aturan yang telah ada, baik itu yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Bapepam atau PT. BEJ menunjukkan bahwa Akuntan, baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan profesi, merupakan bagian terpenting dari penegakkan prinsip *Good Corporate Governance*

Selain pemenuhan prinsip-prinsip *GCG*, dibutuhkan pula perubahan pikiran (*mindset*) atau paradigma yang secara mendasar mengubah budaya perusahaan (misal nilai, norma, mental, dan perilaku individu dalam perusahaan) yang mendasar dalam penerapan *GCG*. Sebagai analogi, untuk mencari rumah di suatu jalan di sebuah kota yang telah banyak berubah kita tidak dapat menggunakan sebuah peta usang. Peta yang lama (paradigma lama) tidak dapat digunakan jika kondisi bisnis saat ini telah berubah. Kita membutuhkan peta yang baru, paradigma dan keyakinan-keyakinan baru terhadap *governance system* di mana hak-hak para pemegang saham (*shareholders*) dihormati dan dilindungi (Tjager dkk, 2003: 58).

Berangkat dari perubahan pikiran dan paradigma yang didasarkan

pada prinsip-prinsip GCG di atas, maka tidak ada pilihan lain kecuali bahwa perusahaan di Indonesia, baik perusahaan publik maupun perusahaan BUMN harus mulai melihal *Good Corporate Governance* bukan sebagai asesoris belaka, tetapi suatu *sistem nilai* dan *best practices* yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai perusahaan dan menuntut pendekatan perilaku dalam penerapannya.

Memang tidak ada suatu sistem yang abadi di dunia ini karena semua yang ada di dunia ini tentu akan berubah disesuaikan dengan paradigma yang ada. Kiranya benar bila ada pepatah yang mengatakan '*Everything in the world will change. To grow is to change, to live is to change, so there is nothing constant in the world except changing*'.

Hadirin yang saya muliakan, akhirnya sebelum saya menutup pidato ini, saya akan menyampaikan pesan untuk mahasiswa dan pesan untuk dosen muda

PESAN UNTUK MAHASISWA

Menjadi mahasiswa hendaknya bukan sekedar mendapatkan nilai dengan Indeks Prestasi tinggi tetapi lengkapilah ilmumu dengan banyak membaca dan berkomunikasi dengan para praktisi baik lewat media seminar atau diskusi. Sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Undip, khususnya program studi Akuntansi, Anda merupakan penerus dan tumpuan masa depan bangsa. Sebagai akuntan nantinya, Anda dituntut untuk menyadari bahwa ilmu akuntansi tidak dapat dipisahkan dengan bidang atau disiplin ilmu-ilmu lainnya termasuk perkembangan teknologi, dunia bisnis, dan bidang lainnya yang jelas akan mempengaruhi profesi akuntansi. Bila dianalisis, dapat dikatakan bahwa kemajuan bidang-bidang tersebut di atas akan berdampak pada profesi akuntan ke dalam tiga hal, yaitu (1) menambah peluang, (2) menambah tantangan, dan (3) menambah ancaman.

Menambah peluang, karena tenaga akuntan sangat diperlukan baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Apalagi dalam era otonomi daerah di Indonesia saat ini yang mengharuskan setiap Kepala Daerah harus mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya setiap akhir tahun anggaran. Adanya aturan ini membuat setiap pemerintah daerah membutuhkan akuntan untuk mengelola catatan dan pelaporan akuntansi dalam aktivitas pemerintahannya. Juga dengan adanya era pasar bebas yang ditandai mulai berlakunya perjanjian GATS (*General Agreement on Trade and Service*), perusahaan multinasional beserta perangkat manajemennya akan tumbuh di

Indonesia. Jasa akuntansi juga akan semakin diperlukan, dan ini merupakan peluang bagi profesi manajer dan akuntan. Era pasar bebas menghendaki adanya transparansi dalam informasi, termasuk informasi akuntansi. Ini berarti bahwa kemampuan para akuntan Indonesia dalam berkomunikasi dan melaporkan informasi keuangan dalam bahasa asing harus ditingkatkan. Dengan kata lain akuntan dituntut untuk menjadi komunikator bisnis.

Menambah tantangan, karena kemajuan teknologi dan dunia bisnis menuntut akuntan untuk berpikir maju dan berkreasi tinggi. Akuntan jangan hanya pandai debit-kredit saja, tetapi harus juga mampu beradaptasi baik dengan kemajuan teknologi, bisnis, maupun lingkungan sosialnya. Dapat dikatakan bahwa akuntan harus mengetahui dan mengerti interaksi akuntansi dengan bidang/disiplin ilmu-ilmu lainnya.

Menambah ancaman, karena disamping peluang, dengan adanya era pasar bebas ini tercipta pula ancaman bagi para manajer dan profesi akuntan. Sebab dalam GATS diatur pula mengenai *free flow of payment and transfer* yang dapat diartikan adanya kebebasan dalam pembayaran dan transfer, termasuk didalamnya transfer tenaga kerja asing (termasuk akuntan) diantara negara-negara yang terlibat dalam perjanjian. Fakta menunjukkan, di Jakarta saat ini banyak akuntan asing bekerja pada perusahaan multinasional, terutama dari negara tetangga kita Filipina dan India. Komunikasi mereka dalam berbahasa asing lebih lancar bila dibandingkan rata-rata akuntan Indonesia. Ini semua merupakan ancaman serius untuk para akuntan Indonesia. Untuk itulah maka paling tidak Anda sebagai calon akuntan Indonesia harus mempunyai 3 kemampuan agar bisa bersaing, yaitu *Communication Skill, Technical Skill, dan Enterpreneurhip*.

PESAN UNTUK DOSEN MUDA

Kepada rekan staf pengajar yang lebih muda, apa yang telah saya kerjakan dan capai sampai dengan hari ini semoga menjadi contoh dan menjadi pemacu anda untuk lebih tekun mendalami ilmu akuntansi dan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang anda tekuni. Masih banyak yang perlu kita lakukan untuk membangun pendidikan akuntansi di Indonesia. Saya percaya bahwa dengan kemampuan dan kemauan serta tenaga yang anda miliki saat ini, bila bersungguh-sungguh hasil yang akan anda peroleh tentunya akan lebih baik dari apa yang saya capai saat ini. *Insyallah*.

Ketua Senat, Sekretaris Senat, para anggota Senat, dan hadirin yang saya

muliakan, kini tiba saatnya bagi saya untuk bersyukur dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam mencapai puncak karier akademik saya sebagai guru besar.

Pertama-tama, ijinkanlah saya sekali lagi memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan yang tiada terhingga kepada saya dan keluarga saya. Terima kasih ya Allah, atas nikmat iman, nikmat kesehatan, dan rezeki sehingga pada hari ini saya diberi amanah yang sangat besar tanggungjawabnya untuk menjadi Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini saya dan keluarga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan sehingga saya bisa mencapai jabatan Guru Besar ini. Saya menyadari bahwa untuk mencapai jabatan akademik ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berbentuk moril maupun materiil, yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu. Oleh karena itu tanpa mengurangi penghargaan dan terimakasih pada berbagai pihak tersebut, saya mohon maaf sekiranya dalam ungkapan rasa terimakasih ini saya hanya menyampaikan kepada pihak-pihak tertentu saja.

Pertama saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku jabatan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36576/A2.7/KP/2005 tertanggal 30 Juni 2005. Saya berharap mampu untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan tersebut.

Selanjutnya saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Ir. Eko Budihardjo, M Sc. selaku Rektor/Ketua Senat dan seluruh anggota Dewan Guru Besar Senat Universitas Diponegoro yang telah menyetujui dan memproses pengusulan saya sebagai Guru Besar dalam ilmu akuntansi. Dalam kesempatan ini juga saya ucapkan terimakasih pula kepada Prof. Dr. Miyasto, S.U. sebagai ketua Peer Group dan Prof. dr. H. Soebowo, DSPA sebagai sekretaris Peer Group, Prof. Dr. Abdullah Kelib, SH., Prof. Drs. Imam Ghozali, M.Com.. Akt. Ph.D, Prof. Drs. Soedjarwo, Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D., dan Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro sebagai anggota Peer Group atas asupan dalam

penyempurnaan pidato pengukuhan ini.

Kepada Prof. Dr. Soewito (Alm.) dan Bapak Sulaiman Mubarak SH, MH saya mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga atas bimbingan dan dorongannya sejak saya masih dosen junior, juga arahan-arahannya untuk terus maju berprestasi hingga saya mencapai jabatan akademik tertinggi ini. Juga kepada Prof. Dr. dr. Ag. Soemantri yang setiap kami berjumpa tak henti-hentinya beliau selalu mendorong saya untuk segera mengusulkan jabatan Guru Besar.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dari saya sekeluarga juga saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi, Dr. H.M. Chabachib, M.Si.Akt. , rekan Dekanat Drs. H. Mudji Rahardjo, S.U. dan Dr. H. Purbayu Budi Santoso, M.S yang setiap harinya memberikan arahan dan motivasi kepada saya. Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah membantu saya dalam proses pengusulan jabatan Guru Besar.

Secara khusus, saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau para pahlawan tanpa tanda jasa yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu kepada saya, yaitu guru-guru dan dosen-dosen saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sejak saya bersekolah di SDN Kalitidu I dan Kepatihan I Bojonegoro, di SMP Negeri I Bojonegoro, di SMA/SMPP Negeri Bojonegoro, di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, di Faculty of Commerce University of Wollongong Australia, dan sampai saya menempuh program doktor di University Sains Malaysia, Penang, Malaysia.

Juga kepada beliau yang telah mengajarkan kepada saya berpikir kritis dalam melakukan penelitian dan penulisan ilmiah yaitu Bapak Drs. Al. Haryono Yusuf, MBA. Akt. (selaku pembimbing skripsi pada waktu saya mengambil program S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada), Prof. Michael J. R. Gaffikin (selaku pembimbing Tesis ketika saya mengambil Program Master of Commerce Honours in Accounting di University of Wollongong), Prof. Dr. Hasnah Haron dan Prof Dr. Daing Nasir Ibrahim (selaku Promotor dan Co-promotor pada saat saya mengambil program Doktor di University Sains Malaysia). Tak lupa rasa terima kasih saya sekeluarga kepada Bapak Drs. H. Daryono Rahardjo, MM yang telah memfasilitasi saya ketika saya melakukan penelitian dan berbagai aktivitas di Jakarta dan memberikan nasihat-nasihat pribadi kepada saya.

Terimakasih pula saya ucapkan kepada rekan-rekan Dosen dan

karyawan di Fakultas Ekonomi yang telah membuat saya merasa nyaman bekerja dan berkarya. Khusus untuk rekan-rekan Dosen Jurusan Akuntansi, karena dukungan aktif dari Anda-anda semualah saya bisa berdiri di sini dan Anda semua yang telah mewarnai karier saya sejak saya jadi dosen junior hingga memangku jabatan Guru Besar ini. Tak lupa, khusus untuk sdr. Bihandono, terima kasih anda telah dengan sabar dan teliti membantu saya untuk mengumpulkan angka kredit, poin demi poin, hingga akhirnya angka kredit untuk menjadi Guru Besar terpenuhi.

Persembahan yang sangat istimewa dengan diiringi doa ketenteraman di alam barzah kepada kedua orang tua saya, Ayahanda H. Imam Sabeni (alm.) dan Ibunda Oemi Syafi'ah (almh.) yang telah mendidik saya sejak kecil hingga beliau tiada. Mereka berdualah yang mengajarkan dan memberikan contoh tentang tujuan hidup, makna dari hidup dan apa yang harus dilakukan ketika kita hidup. Semangat dan kesederhanaan dalam bekerja, berkarya, bergaul dengan sesama adalah petuah dan ajaran beliau berdua yang tiada berharga bagi saya. Juga kepada istriku Ari Pratiwi (almh.) yang kini telah tiada, yang telah berjasa memberikan dorongan dan motivasi kepada saya pada awal karier saya sebagai dosen, awal saya berumah tangga sampai Allah SWT memanggilnya ketika melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wanita, melahirkan anak yang tercinta. Kini, di saat yang berbahagia ini, ketiga orang yang sangat berarti bagi saya tersebut telah tiada dan hanya do'a yang tulus yang bisa saya panjatkan untuk mereka, *Allahumma Firlahum, warkhamhum, wa'afih wa'fuanhuum*.

Terimakasih yang teramat manis dan penghargaan yang sedalam-dalamnya saya sampaikan untuk Istri saya yang tercinta, Hj. Ida Fitriani SPd.I, yang saat ini menjadi pendamping hidupku yang setia baik dalam suka maupun duka dan anak-anakku yang tercinta Rahma Prafinta Sari, Arfiani Sukma, Ziana Trifinta Rizqiani, dan Haliza Dafina Hanifi. Dengan rasa haru, saya ucapkan terima kasih atas cinta, kasih sayang, dan doa yang telah kalian berikan untuk saya. Kalian semua telah banyak berkorban untuk Bapak sehingga tidak berlebihan kiranya jabatan Guru Besar ini kupersembahkan untuk Istri dan Anak-anakku semua dengan harapan semoga Allah SWT akan terus melimpahkan Rahmat dan kasih sayangNya kepada kita semua. Maha Besar Allah, yang telah melimpahkan suasana rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah* yang sangat mendukung karier saya sampai saat ini.

Saya sampaikan pula rasa hormat dan terimakasih kepada Bapak dan Ibu mertua saya, Bapak dan Ibu H. Kustam, yang telah memberikan kasih

sayang, nasihat dan kesejukan hati saya untuk bangkit dan membina keluarga kembali. Beliau berdua selalu mendoakan saya ketika saya sedang belajar dan bekerja. Juga kepada adik-adikku Yunaeli, Sri Ismudiati, Nur Khusniah, Zaenal Abidin, Siti Niswatin dan Emy Susiatin sekeluarga, saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Kalian semua telah dengan setia selalu memberikan dorongan kepada Kakakmu ini hingga Kakakmu saat ini bisa menjadi seorang Guru Besar seperti yang dicita-citakan oleh kedua orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang telah Kakak capai ini dapat menjadi tauladan buat keluarga besar kita semua dan kalian semua turut merasakan kebahagiaan ini.

Tidak lupa, rasa terimakasih juga saya sampaikan untuk semua rekan-rekan panitia yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu proses pengukuhan Guru Besar ini. Juga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, baik moril maupun materiil, sehingga acara ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Semoga Allah S W T membalas semua amal dan kebaikan yang telah Anda berikan kepada saya..... Amin.

Yang terhormat Ketua Senat, Sekretaris Senat, para anggota Senat, dan para hadirin semua yang saya muliakan,

Akhirnya saya sampaikan ucapan terimakasih atas kesediaan dan kesabarannya mendengarkan pidato ini sampai selesai, disertai dengan permohonan maaf apabila ada tingkah laku dan tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para hadirin. Saya juga mohon doa restu agar dalam memangku jabatan Guru Besar yang terhormat tetapi penuh dengan tanggungjawab ini saya dapat menajalankannya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan melimpahkan Taufiq, Rahmah, dan HidayahNya kepada kita semuanya.

Terimakasih dan *akhirul Kalam, Billahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakaatu.*

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. (1992). *The Full Disclosure Concept as a Support for The Quality of Accounting Information*. Thesis. University of Wollongong. Australia.
- Arifin, (1998). *Prinsip Full-Disclosure Sebagai Pendukung Kualitas Informasi Akuntansi*. Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arifin, Hasnah Haron, dan Daing Nasir Ibrahim (2001). 'Consensus Between Users and Preparers on the Importance of the Voluntary Disclosure Items in Annual Reports: an Indonesian Study'. *Proceedings The Fourth Asian Academy Management Conference*. Johor Bahru. Malaysia. Pp 458-468.
- Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM). (1996). 'Laporan Tahunan (Annual Report)'. *Capital Market Fact Book*. Jakarta.
- Belkaoui, Ahmed.R. (1981). *Accounting Theory*. Harcourt Brace Jovanovich. Inc.
- Beaver, W. (1989). *Financial Reporting: an Accounting Revolution*. 2nd edition. Englewood Cliffs. NJ. Prentice-Hall.
- Burrell, G. dan Morgan, G. (1979). *Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Elements of Sociology of Corporate Life*. Heinemann Educational Books Ltd. London.
- Carlson, Steven J. (1988). 'An investigation of investor reaction to the information content of going concern audit report'. *QJBE*, Summer. Vol.37 No. 3.
- Chow, CW dan A. Wong-Boren, (1987), 'Voluntary Financial Disclosure by Mexican Corporation', *Accounting Review*, 62, July, pp.533-541.

- Cooke, T.E., (1989), 'Disclosure in the Corporate Annual reports of Swedish Companies', *Accounting and Business Research*, 19, Spring, pp. 113-124.
- _____, (1992), 'The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed Corporations', *Accounting and Business Research*, 22, Summer, pp. 229-237.
- Eisenhardt, K.M. (1989). 'Agency Theory: An Assesment and Review'. *Academy of Management Review*. January. Pp.: 57 – 74..
- Fama, E.F. (1980). 'Agency Problem and the Theory of the Firm'. *Journal of Political Economy*. Vol. 88. pp. 288-301.
- Fama, E.F. and Jensen, M.C. (1983). 'Separation of Ownership and Control'. *Journal of Law and Economic*. June. pp. 301-325.
- FCGI. (2000). *Corporate Governance*. Forum for Corporate Governance in Indonesia. Jakarta.
- Financial Accounting Standard Board (FASB). (1978). Statement of Financial Accounting Concept No. 1. *The Objective of Financial Reporting*. American Accounting Association.
- Financial Accounting Standard Board. (1980). Statement of Financial Accounting Concept No. 2. *Qualitative Characteristics of Accounting Information*. American Accounting Association.
- Firth, Michael. (1989). 'The Impact of Size, Stock Market Listing and Auditors on Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports'. *Accounting and Business Research*. Autumn. Vol. 9. Hal. 276-280.
- Freeman, R.E. (1984). *Strategic Management: A stakeholder approach*. Pitman Publishing. Boston.
- Hendriksen, Eldon S., dan Michael Van Breda, (1992), *Accounting Theory*. Fifth Edition, Irwin-McGraw-Hill

- Herwidayatmo. (2000). 'Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik di Indonesia'. *Majalah Usahawan*, Oktober, No.10/Th.XXIX
- Ikatan Akuntan Indonesia. (1994). *Standar Akuntansi Keuangan*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976). 'Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure'. *Journal of Financial Economics*. October. Vol. 3. pp. 305-360.
- Kam, Vernon. (1992). *Accounting Theory*. John Wiley and Son Inc.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 Tentang *Jasa Akuntan Publik*.
- Monks, R.A.G. and Minow, N. (1995). *Corporate Governance*. Blackwell Business. Oxford. UK.
- Organization for Economic Cooperation and Development. (1999) *OECD Principles of Corporate Governance*. The OECD Paris.
- Penmann, SH. (1988). 'An Empirical Investigation of the Voluntary Disclosure of Corporate Earning Forecasts'. *Journal of Accounting Research*. Vol. 18. Spring. pp. 132-160.
- Saudagaran, Sakhrokh M., dan Diga, J.G. (1997). 'Financial Reporting in Emerging Capital Market: Characteristics and Policy Issues', *Accounting Horizon*, Vol 11, No. 2.
- Satyo, Nur Kurniawan. (2005). 'Sustainability Reporting: Paradigma Baru Pelaporan Perusahaan'. *Media Akuntansi*. Edisi 47, Tahun XII, Juli. Hal. 7 - 9.
- Scot, W.R. (1997). *Financial Accounting Theory*. Prentice-Hall. New Jersey.

- Shleifer, A. dan Vishny, R. (1997). 'A Survey of Corporate Governance'. *Journal of Finance*. Vol. 52. Hal.: 737 – 783.
- Soegiharto. (2005). 'Peran Akuntan Dalam Menegakkan Good Corporate Governance'. *Auditor*. Edisi 18. Hal. 38 – 41.
- Stoner, J.A.F., Freeman, R.E. dan Gilbert, D.R. (1995). *Management*. Prentice Hall International Edition. Englewood Cliffs.
- Suprayitno G., Khomsiyah, GI, dan Sedarnawati Y. (2004). *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance*. The Indonesian Institute for Corporate Governance.
- Syakhroza, Ahmad. (2005). Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN. *Pidato Pengukuhan Guru Besar. Universitas Indonesia*. Jakarta.
- Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang: *Pengembangan Praktik Good Corporate Governance dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO)*.
- Tjager, I.N., A. Alijoyo H.R. Djemat, dan B. Sembodo. (2003). *Corporate governance: Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*. Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995. *Perseroan Terbatas Indonesia*.
- Walsh, J.P. dan Seward, J.K. (1990). 'On the Efficiency of Internal and External of Corporate Control Mechanisms'. *Academy of Management Review*. July. Hal.: 421 –458.
- Watts, R.L. and J.L. Zimmerman. (1986). *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs. Prentice Hall. USA.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI :

1. Nama Lengkap dan Gelar : Prof. Drs. H. Arifin, MCom.
(Hons.), Akt., Ph.D.
2. N.I.P. : 131 696 214
3. Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
4. Jabatan : Guru Besar
5. Tempat & Tgl Lahir : Bojonegoro, 9 September 1960
6. Agama : Islam
7. Istri : Hj. Ida Fitriani, SPd.I.
8. Anak : Rahma Prafinta Sari
Arfiani Sukma
Ziana Trifinta Rizqiani
Haliza Dafina Hanifi
9. Alamat : Jl. Ratu Ratih IV/39, Tlogosari,
Semarang
Phone (024) 6714441.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL :

1. SD Negeri Kepatihan I Bojonegoro Lulus Tahun 1972
2. SMP Negeri I Bojonegoro Lulus Tahun 1975
3. SMA/SMPP Negeri Bojonegoro Lulus Tahun 1979
4. Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi.
Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Lulus Tahun 1985.
5. Master of Commerce Honours in Accounting.
University of Wollongong, Australia. Lulus Tahun 1992.
6. Philosophy of Doctor (Ph.D.) in Accounting.
Universiti Sains Malaysia, Penang. Lulus Tahun 2002.

C. RIWAYAT KEPEGAWAIAN

1. Riwayat Kepangkatan

No.	Pangkat	Golongan	TMT
1.	Calon Pegawai Negeri Sipil	III a	1 Maret 1987
2.	Penata Muda	III a	1 Mei 1988
3.	Penata Muda Tingkat I	III b	1 April 1992
4.	Penata	III c	1 Oktober 1995
5.	Penata Tingkat I	III d	1 Oktober 1997
6.	Pembina	IV a	1 April 2001

2. Riwayat Jabatan Fungsional :

No.	Jabatan	TMT
1.	Asisten Ahli Madya	1 Pebruari 1989
2.	Asisten Ahli	1 Maret 1992
3.	Lektor Muda	1 Desember 1994
4.	Lektor Madya	1 Juni 1997
5.	Lektor	1 Agustus 2000
6.	Lektor Kepala (<i>inpassing</i>)	1 Januari 2001
7.	Guru Besar	1 Juli 2005

3. Riwayat Jabatan Struktural :

No	Jabatan	Instansi	Periode
1.	Sekretaris Program Studi Akuntansi	Program Diploma III Fak. Ekonomi Undip	1992 – 1993
2.	Sekretaris Jurusan Akuntansi	Fak. Ekonomi Undip	1994 – 1996
3.	Ketua Jurusan Akuntansi	Fak. Ekonomi Undip	1997 – 1999 & 2000 – 2003

(Lanjutan)

No	Jabatan	Instansi	Periode
4.	Staf Ahli Pembantu Rektor II	Universitas Diponegoro	1994 – 1998 & 1999 – 2002
5.	Pembantu Dekan I	Fak. Ekonomi Undip	2003 – Sekarang

D. KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN DALAM ORGANISASI PROFESI

1. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia. Tahun 1985 – Sekarang.
2. Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. 1987 – Sekarang.
3. Staff Kantor Akuntan Publik. Tahun 1986 – Sekarang.
4. Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan, Ikatan Akuntan Indonesia Cabang Jawa Tengah. Tahun 1996 – 1999.
5. Ketua Kompartemen Akuntan Pendidik Cabang Jawa Tengah. Periode tahun 2000 – 2002 dan tahun 2003 – Sekarang.
6. Anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) KONIDA Propinsi Jawa Tengah. Periode Tahun 2001 – 2004 dan Periode tahun 2005 - sekarang

E. TANDA PENGHARGAAN

1. Piagam Penghargaan sebagai Dosen Teladan III tingkat Fakultas dari Rektor Universitas Diponegoro, tahun 1993.
2. Satyalencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia, tahun 2004.

F. PENGALAMAN KEPENGURUSAN DI JURNAL ILMIAH

1. Editorial Board, *The Journal of Accounting, Management, and Economics*, Faculty of Economics, University Technology Yogyakarta. Terakreditasi DIKTI Nomor 23a/DIKTI/Kep/2004.

2. Anggota Dewan Redaksi, *Jurnal Media Ekonomi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi Undip. Terakreditasi DIKTI Nomor 22/DIKTI/Kep/2002.
3. Anggota Dewan Redaksi, *Jurnal Bisnis dan Strategi*, Magister Manajemen, Undip. Terakreditasi DIKTI Nomor 39/DIKTI/Kep/2004.
4. Anggota Dewan Redaksi, *Jurnal MAKSI*, Magister Sains Akuntansi, Undip. Terakreditasi DIKTI Nomor 26/DIKTI/Kep/2005.
5. Anggota Dewan Redaksi, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Undip.
6. Anggota Dewan Redaksi, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis EKOBIS*, Fakultas Ekonomi UNISSULA. Terakreditasi DIKTI Nomor 34/DIKTI/Kep/2003.

G. KARYA TULIS BERUPA BUKU

1. *Pokok-pokok Akuntansi Lanjutan*. Penerbit Liberty, Yogyakarta. Tahun 2002. ISBN Nomor 979-499-212-7.
2. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit BPFE Yogyakarta. Tahun 2001. ISBN Nomor 979-503-124-4. (Co-Author bersama Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M Com. Akt.).
3. *Ikhtisar Teori dan Soal-Jawab Akuntansi Lanjutan, Buku 1*. Penerbit BPFE Yogyakarta. Tahun 1999. ISBN Nomor 979-503-126-0. (Co-Author bersama Prof. Dr. H. Mas'ud Machfoedz, MBA, Akt.).
4. *Ikhtisar Teori dan Soal-Jawab Akuntansi Lanjutan, Buku 2*. Penerbit BPFE Yogyakarta. Tahun 1999. ISBN Nomor 979-503-125-2. (Co-Author bersama Prof. Dr. H. Mas'ud Machfoedz, MBA, Akt.).
5. *Soal-Jawab Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit Liberty. Yogyakarta Tahun 1988. (Co-Author bersama Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Akt.).
6. *Pengantar Akuntansi: Teori, Soal dan Jawaban*. Penerbit Liberty. Yogyakarta. 1990. ISBN Nomor 979-499-051-5. (Co-Author bersama Drs. M. Ichwan, Akt.).

H. PUBLIKASI DALAM JURNAL ILMIAH

1. Arifin S. (1995). 'Problem of Using Accounting Numbers for Determining Economic Position of a Firm'. *Jurnal Media ekonomi dan Bisnis*.
2. Arifin S. (1997). 'Perkembangan Kriteria Penilaian Keandalan Sistem Informasi Akuntansi dalam organisasi.' *Jurnal Bisnis Strategi*, Magister Manajemen Undip Semarang, Vol. 1, Juli. Hal. 67 – 76.
3. Arifin (1999). 'Environmental Scanning and Strategic Planning'. *Media Ekonomi dan Bisnis*. Vol. XI, Nomor 1/Juni Hal. 68 – 78.
4. Arifin (1999). 'A Discussion of Political Influence on the Operation of Management Accounting in Organizations'. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Fak. Ekonomi UII, Yogyakarta. Vol. 3 Nomor 2. Desember. Hal.105 – 121.
5. Arifin (1999). 'The Role of Management Accounting : Its Implementation in the Public Sector'. *Jurnal Bisnis Strategi*. Magister Manajemen Undip. Vol. 3/1999. Hal. 1 – 13.
6. Daing Nasir, Hasnah Haron, Arifin (2000). 'Voluntary Disclosure Items: A Note on Indonesia'. *The Malaysian Accountant Journal*. October. pp.12–19.
7. Arifin, Hasnah Haron, Daing Nasir (2002). 'Consensus Between Users and Preparers on the Importance of Voluntary Disclosure Items in Annual Reports: An Indonesian Study'. *Malaysian Accounting Review*. Universisy Technology Mara. Pp. 71 – 86.
8. Arifin, Hasnah Haron (2002). 'The Impact of the Board of Directors Composition, Audit Committee and Firm Size on the Level of Voluntary Disclosure; Empirical Evidence from the Jakarta Stock Exchange'. *Proceeding for The Fourth Annual Malaysian Finance Association Symposium*. Penang, Malaysia. 30 May - 1 June 2002.
9. Arifin S. (2002). 'An Empirical Analisisi of the Relation Between The Board of Director's Composition and the Level of Voluntary Disclosure'. *Proceeding of the Fifth Indonesian Conference on Accounting*. Semarang, September. Pp. 46 – 57.
10. Anna Suzanti, M. Nasir, dan Arifin S. (2003). 'Analisis Pengaruh Perataan Laba terhadap Resiko Pasar Saham dan Return Saham Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta'. *Jurnal KOMPAK*. Fakultas Ekonomi UTY.

11. Norhadi dan Arifin Sabeni (2003). 'Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Go-Publik di Bursa Efek Jakarta'. *Jurnal MAKSI*. Vol. 1, Agustus.
12. Arifin (2003). 'Reasons of Indonesian Companies Disclosed Voluntary Items: An Empirical Analysis'. *Jurnal Media Ekonomi & Bisnis*. Fak. Ekonomi Undip. Vol. XV/No. 2/Des. 2003. Hal. 37 – 47.
13. Arifin (2004). 'A Contingency Approach on the Relation Between Firm's Environment and Strategic Planning Formulation'. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis EKOBIS*. Fakultas Ekonomi UNISSULA. Vol. 5, Nomor 2, Juli 2004. Hal. 143 – 151.
14. Nina S, Kholiq M, dan Arifin S. (2004). 'Hubungan Profesionalisme, Konflik Keorganisasional-Profesional dan Work-Outcome'. *Jurnal MAKSI*. Vol. 4, Agustus. Hal. 214 – 236.
15. Arifin S. (2004). 'The Perceived Usefulness of Voluntary Items by Financial Analysts in Indonesia'. *Jurnal KOMPAK*. Fakultas Ekonomi Universitas Teknologi Yogyakarta. Mei-Agustus. Hal. 250 – 267.
16. Partiwati D.A. dan Arifin S. (2005). 'Hubungan Intellectual Capital dan Business Performance dengan Diamond Specification : Sebuah Perspektif Akuntansi'. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi* 8. Solo, 16 September 2005.

I. PENELITIAN

1. Prinsip Full Disclosure sebagai Pendukung Kualitas Informasi Akuntansi. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 1985.
2. The Full Disclosure Concept as a Support for the Quality of Accounting Information. A Master Thesis. Department of Accountancy, University of Wollongong. Australia. 1991.
3. Studi Empiris Tentang Frekuensi Audit, Pendidikan dan Pengalaman terhadap Mutu Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Semarang. Penelitian Dibiayai oleh DIP Proyek Operasi dan Perawatan (OPF) Fakultas Ekonomi Undip. Tahun 1992.

4. Analisis Relevansi dan Reliabilitas Laporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia. Penelitian DP4M. Direktorat Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1998.
5. Inventarisasi dan Penilaian Aset Pemerintah Kota Semarang. Kerjasama antara Program Magister Sains Akuntansi dengan Pemerintah Kota Semarang (sebagai Ketua Tim). Tahun 2001.
6. Firm's Characteristics Affecting the Level of Voluntary Disclosure of Indonesian Companies Listed on the Jakarta Stock Exchange. Ph.D. Dissertation. University Sains Malaysia, Penang. Tahun 2002.
7. Inventarisasi dan Penilaian Aset Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Kerjasama antara Fakultas Ekonomi Undip dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Tahun 2004.
8. Praktek Voluntary Disclosure dalam Laporan Keuangan sebagai Pendukung Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Publik di Indonesia. Penelitian Multi-years Hibah Bersaing. Dibiayai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Tahun 2003 – 2005.

J. PELATIHAN

1. Ketua Tim Pelatihan Manual Akuntansi dan Anggaran Perguruan Tinggi Universitas Diponegoro. Tahun 1993.
2. Ketua Tim Pelatihan Pemantapan Manajemen Keuangan dan Manajemen Pelelangan Ikan dan untuk Karyawan Puskud Mina Baruna. Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah, Pekalongan, 1994.
3. Instruktur In-House Training Akuntansi Keuangan dan Pemahaman Laporan Keuangan PT. Suba Indo. Surabaya, Agustus 1999.
4. Anggota Tim Sosialisasi Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). PT. Bank BPD Jawa Tengah. September 2001.
5. Ketua Tim Sosialisasi Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 untuk Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. Tahun 2002.
6. Instruktur In-House Training Manajemen Keuangan untuk Manajer Non-keuangan PT. Hutama Karya, Semarang. 2002.
7. Instruktur In-House Training Manajemen Keuangan dan Pemahaman Laporan Keuangan untuk Staf Non-Keuangan PT. Yogya Department Store. Bandung, Agustus 2002.
8. Ketua Tim Sosialisasi Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 untuk Kabupaten Grobogan, Tahun 2003.

9. Ketua Tim Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo. Tahun 2003.
10. Ketua Tim Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Papua. Nopember 2003.
11. Instruktur Pelatihan Manajemen Terapan untuk Usaha Kecil dan Koperasi Mitra Binaan PUKK Pertamina UPMS IV Semarang. Agustus 2003.
12. Instruktur Pelatihan Teknis Penyusunan RAPBD Berbasis Anggaran Kinerja Berdasarkan UU RI No. 17/2003 dan Kepmendagri No. 29/2002. Teluk Kuantan Singingi. September 2003.
13. Ketua Tim Instruktur Improving Lending Skill Bagi Staff Bank Internasional Indonesia (BII). Kerjasama antara BII dengan Magister Akuntansi, Undip. Semarang, Pebruari, 2003.
14. Instruktur dalam Pelatihan Penyusunan Anggaran Berdsarkan Kep. Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 Kabupaten Pemalang. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Fakultas Ekonomi Undip. April 2003.
15. Instruktur Simulasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Kerjasama Laboratorium Pengembangan Akuntansi FE Undip dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Tahun 2002.
16. Instruktur Pelatihan Pendidikan Profesi Pasar Modal tentang Analisis Laporan Keuangan Perusahaan. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. April 2004.

K. PARTISIPASI SEMINAR/KONFERENSI/SIMPOSIUM

Tingkat Nasional :

1. Pemakalah pada Seminar Nasional. Peranan Akuntansi dan Tanggungjawab Hukum Profesi Akuntan dalam Era PJPT II. Pusat Pengembangan Akuntansi Depdikbud bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Undip. 18 Januari 1993.
2. Pembicara pada Simposium Sumber Daya Manusia. Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Era Transparansi Informasi. Dies Natalis Fakultas Ekonomi Undip ke 33. 27 Mei 1993.
3. Pembicara pada Seminar Sehari Universitas Muhammadiyah Magelang. Peranan Profesi Akuntan pada Massa PJP Tahap II. Magelang, 7 – 11 Januari 1993.

4. Pembicara pada Diskusi Panel Ikatan Akuntan Indonesia Cabang Jawa Tengah tentang Kritik dan Saran terhadap Exposure Draft PSAK Nomor 8 – 12. Semarang, 8 Pebruari 1993.
5. Pemakalah dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 1993/1994 yang diselenggarakan oleh DP4M Dirjen DIKTI, Depdikbud. Sawangan, Bogor. 7 – 11 Jnuari 1995.
6. Pembicara dalam Seminar Akuntansi. Karakteristik Kualitas Informasi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nomensen, Medan. Pebruari 2002.
7. Pemakalah pada Seminar Akademik dalam rangka Launching Semarang School of Business, Universitas Semarang tentnag Kurikulum kuntansi di Era Pasar Bebas. Semarang, 7 Pebruari 2002.
8. Pemakalah pada Simposium Dwi Tahunan Universitas Teknologi Yogyakarta. Analaisi Relevansi dan Reliabilitas Laporan Keuangan. Yogyakarta, 6 April 2002.
9. Pemakalah dan Moderator pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke 5, Semarang, 5 -6 September 2002.
10. Pemakalah dan Moderator pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke 6, Surabaya, 16 – 17 Oktober 2003.
11. Pemakalah pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke 7, Denpasar, 2 – 3 Desember 2004.
12. Pemakalah dan Moderator pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke 8, Solo, 15 – 16 September 2005.

Tingkat Internasional :

1. Pemakalah pada Asian Academy Management Conference. Johor Bahru, Malaysia, Nopember 2001.
2. Pemakalah pada The Fourth Annual Malaysian Finance Association Symposium. ‘The Impact of the Board of Directors Composition, Audit Committee and Firm Size on the Level of Voluntary Disclosure; Empirical Evidence from the Jakarta Stock Exchange’. Penang, Malaysia, Juni 2002.
3. Pemakalah pada The Fifth Indonesian Conference on Accounting. ‘An Empirical Analysis of the Relation Between The Board of Directors’ Composition and the Level of Voluntary Disclosure’. The Indonesian Institute of Accountants, Accountant Educators Compartment. Semarang, 5 – 6 September 2002.